



### Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001–2004)

Megawati Soekarnoputri merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri dibantu oleh Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut.



Megawati Soekarnoputri

Sumber: <https://web.archive.org/web/20201129131556/https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/kronik-negara-dan-presiden-1901-2014-megawati-soekarnoputri>, diunduh 8 Maret 2021

#### 1. Membentuk Agenda Pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong

Presiden Megawati dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut *zaken kabinet* karena  $\frac{2}{3}$  menteri dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tertuang dalam agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut.

- Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan.
- Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.
- Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

#### 2. Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu perubahan penting tersebut adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Selain itu, pemerintah dan MPR sepakat membatasi wewenang MPR, kesejajaran kedudukan presiden dan DPR, serta penetapan APBN yang diajukan presiden.

Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan bersifat independen. Oleh karena itu, MA diharapkan menjadi penegak hukum yang mampu menembus sistem birokrasi yang selama masa pemerintahan sebelumnya sering disalahgunakan. Upaya lain untuk menuntaskan cita-cita reformasi adalah perencanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Keadaan hukum di Indonesia belum menempatkan keadilan yang nyata karena masih banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan hukum. Selama ini perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih banyak terjadi di ranah peradilan. Dengan demikian, pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya melalui penataan dan pembersihan hakim serta peningkatan kesejahteraan hakim.

Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2002. Pembentukan KPK ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain KPK, pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah.

### 3. Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik yang menyita perhatian publik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Presiden Megawati Soekarnoputri berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di halaman masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menjaga kedaulatan NKRI juga diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa tersebut makin berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral. Permasalahan tersebut akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pada perkembangannya hasil keputusan Mahkamah Internasional tidak menguntungkan Indonesia. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia.

### 4. Melakukan Reformasi di Bidang Ekonomi

Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai berikut.

- a. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru sebesar US\$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US\$5,8 miliar pada pertemuan *Paris Club* tahun 2002.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekira US\$930. Kebijakan ini mendapat sambutan dari pasar karena tidak sampai sebulan dilantik sebagai presiden, kurs mata uang rupiah menguat menjadi Rp8.500,00 per US\$ (semula Rp9.000,00 per US\$).
- c. Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.
- d. Memperbaiki kinerja ekspor.

Pada 2002 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pada masa itu perekonomian Indonesia mengalami surplus dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terciptanya swasembada beras terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia makin membaik dan didukung kebijakan larangan impor beras pada 2003 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2002.

Pada masa awal jabatannya, Presiden Megawati Soekarnoputri mengatasi masalah utang luar negeri dengan meminta penundaan pembayaran utang. Gebrakan lain yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah mengakhiri kerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

### 5. Melaksanakan Pemilu 2004

Salah satu keberhasilan yang dicapai Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden, pemilu dilaksanakan dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mengantongi suara lebih dari 50%. Pemilu pada putaran kedua dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan perolehan 60,62% suara mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan perolehan 39,38% suara.